

Florida Kahi Ata Jawa

by UNITRI Press

Submission date: 01-May-2024 11:29PM (UTC-0500)

Submission ID: 2302294848

File name: Florida_Kahi_Atata_Jawa.docx (47.45K)

Word count: 1017

Character count: 7248

1
**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAN MENUNJANG KEMANDIRIAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI



Oleh :
FLORIDA KAH IATA JAWA
NIM : 2016110062

2
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan fungsi dan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mencari metode untuk meningkatkan pendapatan dan inisiatif untuk memperkuat pemungutan pajak daerah. Rencana eksplorasi menggunakan teknik yang secara subyektif eksplisit. Organisasi tersebut berencana menggunakan pemantauan, menggunakan juru sita untuk melakukan pemungutan, dan bekerja sama dengan otoritas lain untuk melakukan penagihan dan ekstensifikasi objek daerah yang belum teridentifikasi sebagai bagian dari tujuannya untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah, menurut hasil penelitian. Struktur Bapeda bertujuan untuk menjaga independensi Pemerintahan Rezim Pasuruan sekaligus memperkuat kapasitas keuangannya. mendukung sistem dokumentasi biaya online sebagai tambahan. Mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ramah kelompok, seperti menurunkan denda keterlambatan angsuran penilaian untuk menghindari masalah bagi warga, dan membuat kerangka kerja yang mengakomodasi angsuran biaya, adalah contoh penerapan model program ini. memenuhi kewajiban finansialnya. Metodologi Pendukung Aset, khususnya dengan meningkatkan jumlah otoritas penilaian dan terlebih lagi mewajibkan satu perwakilan untuk memenuhi banyak tugas yang diberikan kepadanya. strategi kelembagaan seperti bekerja sama dengan otoritas lain, mengeluarkan poster, stiker, dan peringatan, mengingatkan wajib pajak yang gagal melakukan penyetoran tepat waktu, memverifikasi pembayaran untuk wajib pajak tersebut, dan Tujuan dari penggalangan pendapatan penilaian teritorial adalah untuk mendukung kemandirian finansial dan batasan pendapatan. Pemerintahan Pasuruan melalui peningkatan basis pendapatan, penyempurnaan strategi pemilahan, penguatan kewenangan pengawas pendapatan daerah, penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan prakiraan potensi pendapatan.

Kata Kunci: *Strategi, Pajak Daerah, Kemampuan Keuangan dan Kemandirian Pemerintah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meskipun kemiskinan meningkat akibat krisis ekonomi dan kepercayaan di Indonesia, transformasi besar di banyak aspek masyarakat Indonesia juga dimungkinkan oleh krisis ini. Sebagai bagian dari reaksi yang lebih luas terhadap krisis ekonomi dan kepercayaan negara serta dimulainya era baru, reformasi menyeluruh mencakup pemberian otonomi. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Ketetapan Nomor IV/MPR/2000 tentang Usulan Strategi Dalam Penyelenggaraan Kemerdekaan Wilayah oleh MPR-RI.

TAP MPR memberikan akses terhadap perubahan aturan-aturan umum yang juga telah mengalami beberapa penyesuaian. Antara lain, Peraturan ⁵ Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Dana Daerah dan Provinsi serta Peraturan ³ Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Ekologis, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2008. Kekuasaan umum diganti berdasarkan Pedoman No. 33 (2004) tentang Persahabatan Terkait Uang antara Negara Pusat dan Negara Biasa. Peredaran aset lokal, umum, dan fokus biasanya dipengaruhi oleh peningkatan ini.

Mengenai uraian sebelumnya, Halim (2004: 187) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang dapat mempertahankan kemandiriannya harus mencakup ciri-ciri penting sebagai berikut: 1) Batasan keuangan daerah, dan hal itu mengisyaratkan adanya tuntutan agar lokasi mempunyai kewenangan dan kemampuan. bisa melihat.

(2) Untuk memaksimalkan sumber daya keuangannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu bergantung pada dukungan pemerintah. Hal ini dijamin oleh mekanisme penyeimbangan uang adat dan masyarakat, yang didukung oleh organisasi regional negara tersebut.

Permasalahan Rezim Pasuruan bermula dari persoalan biaya administrasi publik yang membengkak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah (kebutuhan keuangan) namun kecepatan pengembangan gaji provinsi (batas moneter) tidak diperlukan sehingga menciptakan kekosongan keuangan di daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk menutup defisit anggaran dan mendorong kemandirian, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan pusat (S. Loce, 2011).

Kenaikan tersebut merupakan program perpajakan yang sangat cerdas yang harus dilakukan agar dapat memberikan keuntungan dan membantu meningkatkan pendapatan PAD. Pengeluaran mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian provinsi karena mempunyai kapasitas yang luas dan beragam sehingga dapat diandalkan karena tidak berbahaya bagi produk ekologi. Oleh karena itu, menyelidiki kemungkinan sumber bea teritorial sangat penting untuk mempertahankan pendapatan lingkungan (Susi Lawati, 2018).

Pasalnya, ada sejumlah variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi efektivitas otonomi daerah selain kepemilikan keuangan daerah atau PAD. Sebagai contoh, perhatikan unsur-unsur seperti standar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia; sumber dana abadi; penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan sistem informasi yang dapat diakses. Salah satu cara untuk menilai kemampuan suatu

lokasi untuk melaksanakannya secara bebas adalah dengan membagi jumlah agregat Bantal yang diterima suatu kabupaten. Jika berbagai asosiasi (dalam hal ini lokal dan negara bagian) tidak memberikan bantuan dari luar, daerah akan kesulitan mengelola dan melindungi diri mereka sendiri dengan sumber daya yang memadai (M.N. Afandi, 2018).

PAD Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. PAD mencapai Rp7.945.825.377 pada tahun 2005, dengan kontribusi hanya sekitar 4,45% terhadap APBD. Angka ini meningkat menjadi Rp. 8.962.542.100 pada tahun 2006, namun kontribusinya menurun sekitar 3,20% dari APBD sebesar Rp. 279.511.013.700. Pada tahun 2007, PAD melebihi Rp11.460.674.100,- atau sekitar 3,65% dari total kontribusi APBD sebesar Rp 313.420.036.249. Pada tahun 2008, laju kenaikannya terus berlanjut, dengan PAD mencapai Rp14.166.551.839,00 dan kontribusi APBD mencapai Rp341.019.508.306. PAD mencapai Rp 19.380.294.898 pada tahun 2009, namun persentasenya masih kecil terhadap APBD. Meskipun PAD terus melakukan ekspansi, potensi Kabupaten Pasuruan untuk mencapai kemandirian finansial dipengaruhi oleh kecilnya kontribusi PAD terhadap APBD, sehingga tetap dapat diandalkan oleh pemerintah federal.

Peneliti memutuskan untuk meneliti: “**Strategi Peningkatan Pendapatan Dan Penerimaan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Keuangan Dan Menunjang Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pasuruan**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berikut kemungkinan pernyataan permasalahan berdasarkan latar belakang permasalahan di atas:

1. Bagaimana rencana peningkatan pendapatan pajak daerah untuk mendukung kemandirian Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan memperluas kapasitas keuangan?
2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai hasil dari rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan berikut harus dipenuhi:

1. Mengidentifikasi cara meningkatkan pendapatan dalam upaya memperkuat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan mempertahankan kemandiriannya.
2. Menentukan cara untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dalam upaya memperkuat kedudukan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan mempertahankan kemandiriannya.

1.3.1 ⁴Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kesadaran, memberikan pandangan segar, dan menambah pengetahuan tentang strategi peningkatan pendapatan daerah dan penerimaan pajak dalam upaya menjaga independensi pemerintah dan meningkatkan kapasitas keuangan.

2. Bagi pemerintah

Untuk memperkuat kemampuan keuangan dan mendorong kemandirian pemerintah, studi ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak data untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan ketika menyusun undang-undang yang berkaitan dengan keuangan daerah dan kinerja perekonomian.

Florida Kahi Ata Jawa

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Culver-Stockton College Student Paper	3%
2	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	vdocuments.mx Internet Source	1%
5	Moza Dela Fudika, Rosyidi Hamzah. "Dinamika Hukum Perpajakan Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2021 Publication	1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Florida Kahi Ata Jawa

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
